

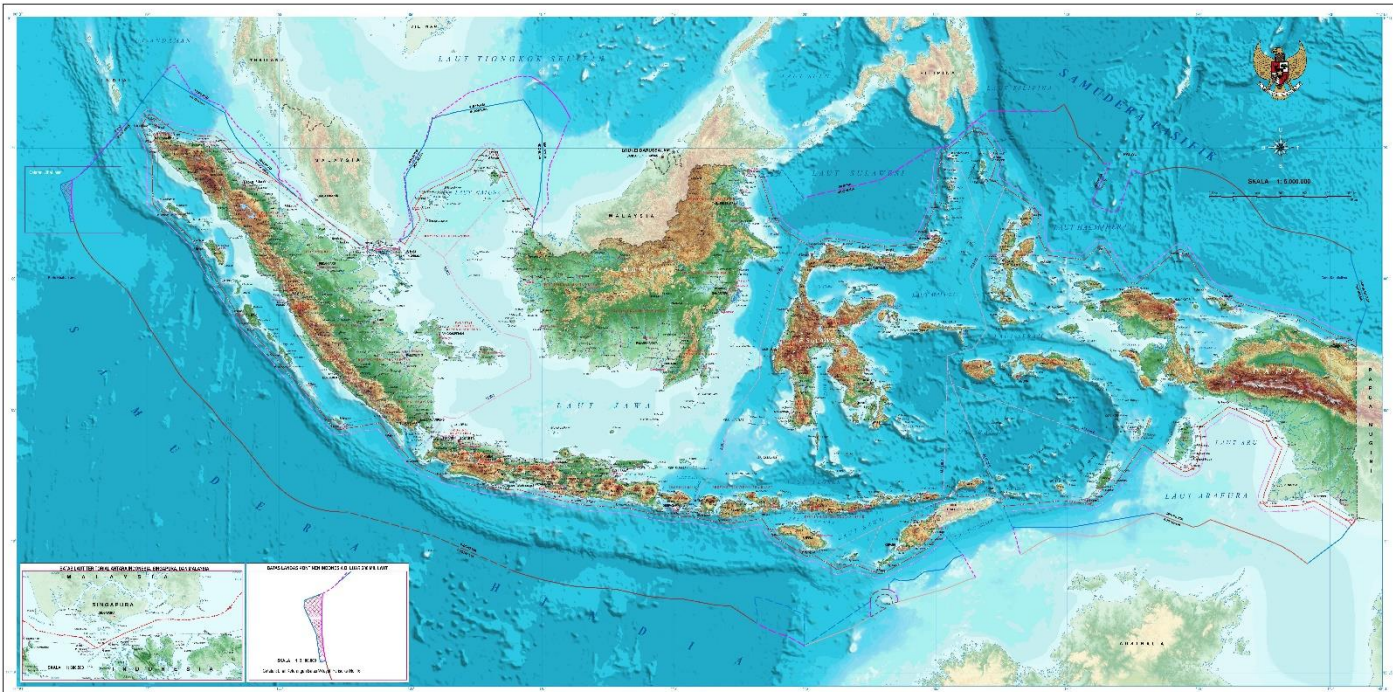
KONSEP WILAYAH DAN TATA RUANG

MEMBUMI



WILAYAH

PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



LEGENDA	
1. Batas Wilayah	2. Garis Pantai
3. Garis Pantai	4. Garis Pantai
5. Garis Pantai	6. Garis Pantai
7. Garis Pantai	8. Garis Pantai
9. Garis Pantai	10. Garis Pantai
11. Garis Pantai	12. Garis Pantai
13. Garis Pantai	14. Garis Pantai
15. Garis Pantai	16. Garis Pantai
17. Garis Pantai	18. Garis Pantai
19. Garis Pantai	20. Garis Pantai
21. Garis Pantai	22. Garis Pantai
23. Garis Pantai	24. Garis Pantai
25. Garis Pantai	26. Garis Pantai
27. Garis Pantai	28. Garis Pantai
29. Garis Pantai	30. Garis Pantai
31. Garis Pantai	32. Garis Pantai
33. Garis Pantai	34. Garis Pantai
35. Garis Pantai	36. Garis Pantai
37. Garis Pantai	38. Garis Pantai
39. Garis Pantai	40. Garis Pantai
41. Garis Pantai	42. Garis Pantai
43. Garis Pantai	44. Garis Pantai
45. Garis Pantai	46. Garis Pantai
47. Garis Pantai	48. Garis Pantai
49. Garis Pantai	50. Garis Pantai
51. Garis Pantai	52. Garis Pantai
53. Garis Pantai	54. Garis Pantai
55. Garis Pantai	56. Garis Pantai
57. Garis Pantai	58. Garis Pantai
59. Garis Pantai	60. Garis Pantai
61. Garis Pantai	62. Garis Pantai
63. Garis Pantai	64. Garis Pantai
65. Garis Pantai	66. Garis Pantai
67. Garis Pantai	68. Garis Pantai
69. Garis Pantai	70. Garis Pantai
71. Garis Pantai	72. Garis Pantai
73. Garis Pantai	74. Garis Pantai
75. Garis Pantai	76. Garis Pantai
77. Garis Pantai	78. Garis Pantai
79. Garis Pantai	80. Garis Pantai
81. Garis Pantai	82. Garis Pantai
83. Garis Pantai	84. Garis Pantai
85. Garis Pantai	86. Garis Pantai
87. Garis Pantai	88. Garis Pantai
89. Garis Pantai	90. Garis Pantai
91. Garis Pantai	92. Garis Pantai
93. Garis Pantai	94. Garis Pantai
95. Garis Pantai	96. Garis Pantai
97. Garis Pantai	98. Garis Pantai
99. Garis Pantai	100. Garis Pantai

Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Th 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Wilayah adalah ruang yang merup kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yg batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/aspek fungsional.

Dari beberapa pengertian disimpulkan bahwa wilayah adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian, wilayah kota berbeda dengan wilayah perdesaan.

Wilayah yang memiliki ciri khas tersebut dalam geografi disebut **region**.

Berdasarkan unsur fisik. Misalnya, wilayah geologi (geological region), wilayah jenis tanah (soil region), wilayah iklim (climatic region), dan wilayah vegetasi (vegetation region).

Berdasarkan unsur sosial budaya manusia seperti wilayah bahasa (linguistic region), wilayah ekonomi (economic region), wilayah sejarah (historical region), dan wilayah politik (political region) seperti halnya batas negara-negara di dunia.

Berdasarkan kekhasannya wilayah dapat dibedakan menjadi dua jenis.

- a. Wilayah yang didasarkan atas konsep homogenitas disebut juga **wilayah formal (homogeneous/uniform region)**
- b. Wilayah yang didasarkan atas konsep heterogenitas disebut juga **wilayah fungsional (nodal region/organic region)**

Wilayah Formal/Uniform Region

Wilayah formal yang juga disebut uniform region adalah suatu wilayah yg dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk ke dalamnya kenampakan fisik muka bumi, iklim, vegetasi, tanah, bentuk lahan, dan penggunaan lahan. Region formal ini bersifat statis.

Dalam kehidupan sehari-hari wilayah formal banyak dikaitkan dengan keseragaman pemerintahan sehingga wilayah formal identik dengan wilayah yang dibatasi oleh **administrasi pemerintah**.

Berdasarkan konsep ini maka muncul wilayah Dusun, wilayah Kelurahan, wilayah kecamatan, wilayah kabupaten, wilayah Provinsi, dan wilayah Negara.

Menurut pengertian tersebut, batas wilayah formal menjadi sangat jelas, yaitu antara wilayah satu dan wilayah lainnya dengan dibatasi oleh batas-batas administrasi pemerintah.

Wilayah Fungsional/Nodal Region

Wilayah fungsional didasarkan atas konsep heterogenitas. Wilayah ini tercermin dengan adanya suatu pola interdependensi dan pola interaksi gejala-gejala yang terdapat di wilayah yang bersangkutan.

Penekanan utama wilayah fungsional adalah hubungan fungsional.

Dengan adanya kegiatan di suatu pabrik, akan tercipta suatu kesatuan hubungan dan pola ketergantungan antara core (dalam hal ini berarti pabrik) dengan daerah disekitarnya yang berisi orang-orang yang beraktivitas di daerah core.

4 unsur penting dalam suatu region nodal.

- a. Adanya arus barang, ide/gagasan dan manusia.
- b. Adanya node (pusat) yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir.
- c. Adanya wilayah yang makin meluas.
- d. Adanya jaring-jaring rute tempat berlangsungnya tukar menukar.

Kesimpulan : bahwa wilayah fungsional terkait dengan interaksi yang berlangsung, baik interaksi yang bersifat fisik maupun sosial. Interaksi fisik meliputi interaksi antara kota yang dikelilingi daerah sekitarnya, Sedangkan interaksi sosial merupakan interaksi antar masyarakat yang menghasilkan perbedaan struktur masyarakat sehingga akan kita jumpai adanya pusat-pusat pemerintahan yang dikelilingi oleh daerah sekitarnya.

Contoh : wilayah fungsional ialah **Kota Jakarta**. Kota ini menjadi core dan node dari Negara Indonesia.

PERWILAYAHAN

Perwilayahan?

- Suatu proses pengelompokkan atau pengklasifikasian wilayah berdasarkan sifat atau kriteria yang sama.
(fisik maupun sosial)

Perwilayahan Berdasarkan Kenampakan Alami

- Natural Region (wilayah alamiah atau fisik)
- Single Feature Region (wilayah ketampakan tunggal)
- Generic Region (wilayah berdasarkan jenisnya)
- Specific Region (wilayah spesifik atau khusus)
- Region Factor Analysis (wilayah analisis faktor)

Natural Region

- Pertanian
- Kehutanan



Single Feature Region

- Iklim (Tropis, Subtropis, Sedang, Dingin)
- Hewan (Australis, Oriental)
- Tumbuhan (Sabana, Tundra)



Manfaat Regionalisasi

1. Membantu memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna.
2. Mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi.
3. Menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan yang sangat beragam.
4. Memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia.

TATA RUANG

Tata Ruang ?

- Struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Penataan Ruang

- Berdasarkan sistem: sistem wilayah dan sistem internal perkotaan
- Berdasarkan fungsi kawasan: kawasan lindung dan kawasan budi daya
- Berdasarkan administrasi: wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota
- Berdasarkan kegiatan kawasan: kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan
- Berdasarkan nilai strategis: kawasan strategis provinsi, kawasan strategis kabupaten/kota

PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan

- Upaya sadar manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya

Konsep Pokok Pembangunan

- Perubahan dari sesuatu yang kurang menuju kesempurnaan.
- Pembangunan bertujuan demi kelestarian, kesejahteraan dan kebahagiaan
- Pembangunan bertujuan mengembangkan potensi masyarakat

Hakikat Pembangunan

- Pembangunan Ekonomi
- Pembangunan Sosial

Wilayah Pembangunan di Indonesia

Sepuluh Wilayah Pembangunan, yang dikelompokkan dalam empat Wilayah Pembangunan Utama.

1. **Wilayah Pembangunan Utama A** dengan Pusat Utama **Medan.**

Wilayah Pembangunan I, meliputi Provinsi-provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

Wilayah Pembangunan II meliputi Provinsi-provinsi Sumatra Barat dan Riau.

2. **Wilayah Pembangunan Utama B** dengan Pusat Utama **Jakarta Raya.**

Wilayah Pembangunan III, meliputi Provinsi-provinsi Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu.

Wilayah Pembangunan IV, meliputi Provinsi-provinsi Lampung, Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Wilayah Pembangunan VI meliputi Provinsi Kalimantan Barat.

3. **Wilayah Pembangunan Utama C dengan Pusat Utama Surabaya.**

Wilayah Pembangunan V, meliputi Provinsi-provinsi Jawa Timur dan Bali.

Wilayah Pembangunan VII, meliputi Provinsi-provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

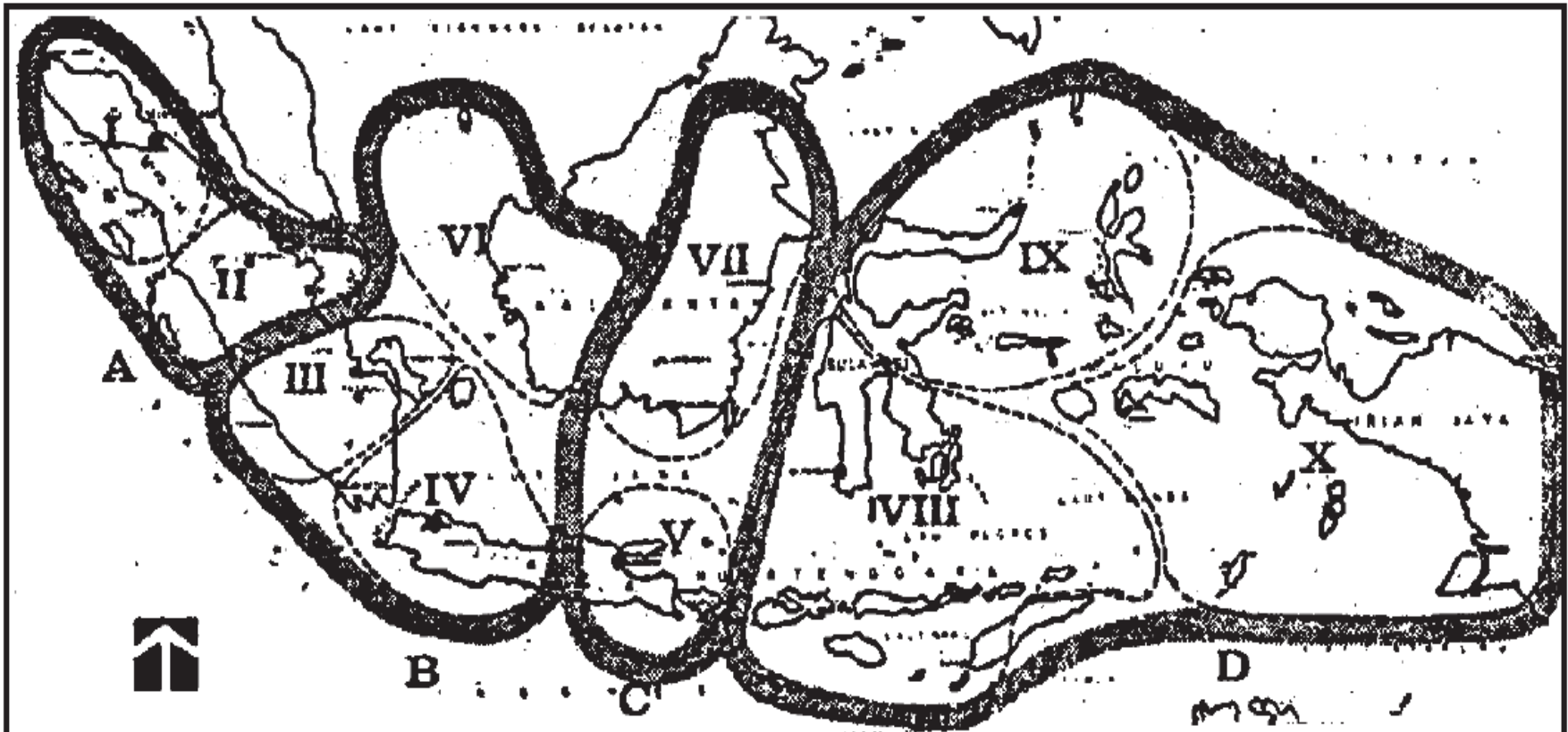
4. **Wilayah Pembangunan Utama D dengan Pusat Utama Ujung Pandang.**

Wilayah Pembangunan VIII meliputi Provinsi-provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Wilayah Pembangunan IX, meliputi Provinsi-provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, dan

Wilayah Pembangunan X, meliputi Provinsi-provinsi Maluku dan Irian Jaya.

WILAYAH PUSAT PEMBANGUNAN DI INDONESIA



Wilayah pembangunan di atas selanjutnya dikembangkan lagi menjadi wilayah pembangunan yang lebih kecil lagi yaitu tingkat daerah pada provinsi.

Contohnya **Jawa Barat** dibagi menjadi 6 wilayah pembangunan daerah, sebagai berikut:

- 1) **Wilayah Pembangunan JABOTABEK** (termasuk sebagian kecil wilayah kabupaten sukabumi). Pada wilayah ini dikembangkan berbagai aktivitas industri yang tidak tertampung di Jakarta.
- 2) **Wilayah Pembangunan Bandung Raya**. Wilayah ini dikembangkan pusat aktivitas pemerintahan daerah, pendidikan tinggi, perdagangan daerah, industri tekstil. Untuk konservasi tanah dan rehabilitasi lahan kritis di pusatkan di wilayah-wilayah kabupaten Garut, Cianjur, Bandung, dan Sumedang.
- 3) **Wilayah Pembangunan Priangan Timur**. Wilayah ini meliputi daerah kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis.

- 4) **Wilayah Pembangunan Karawang.** Wilayah ini dikembangkan sebagai produksi pangan (beras/padi) dan palawija. Meliputi pula daerah-daerah dataran rendah pantai utara (Pantura) seperti Purwakarta, Subang, dan Karawang. Pusatnya Kota Karawang.
- 5) **Wilayah Pembangunan Cirebon dan sekitarnya.** Wilayah ini dikembangkan sebagai pusat industri pengolahan bahan agraris, industri, petrokimia, pupuk, dan semen. Untuk keperluan tersebut, pelabuhan Cirebon ditingkatkan fungsinya untuk menampung kelebihan arus keluar masuk barang dari pelabuhan Tanjung Priok.
- 6) **Wilayah Pembangunan Banten.** Wilayah ini berpusat di Kota Serang dan Cilegon, terdiri atas 4 zone yaitu Bagian Utara diutamakan untuk perluasan dan intensifikasi areal pesawahan teknis, selatan untuk wilayah perkebunan dan tanaman buah-buahan, wilayah Teluk Lada diperuntukkan bagi intensifikasi usaha pertanian, dan daerah sekitar Cilegon dikembangkan sebagai pusat industri berat (besi baja).

PERTUMBUHAN WILAYAH

Pusat-Pusat Pertumbuhan

Pusat pusat pertumbuhan adalah cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk menentukan daerah tertentu yang dianggap strategis sehingga pada gilirannya akan memberi efek menetes bagi daerah sekitarnya.

Faktor Pusat Pertumbuhan

- Sumber Daya Alam
- Sumber Daya Manusia
- Kondisi Fisiografi/lokasi
- Fasilitas penunjang

Pengaruh Pusat Pertumbuhan terhadap Wilayah Sekitar

- Persebaran Sumber Daya
- Perkembangan Ekonomi
- Perubahan Sosial Budaya Masyarakat

Ciri-ciri Pusat Pertumbuhan

- Adanya hubungan internal dan beragam aktivitas
- Adanya efek ganda
- Adanya konsentrasi geografis
- Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ke daerah sekitarnya

TEORI PERTUMBUHAN WILAYAH

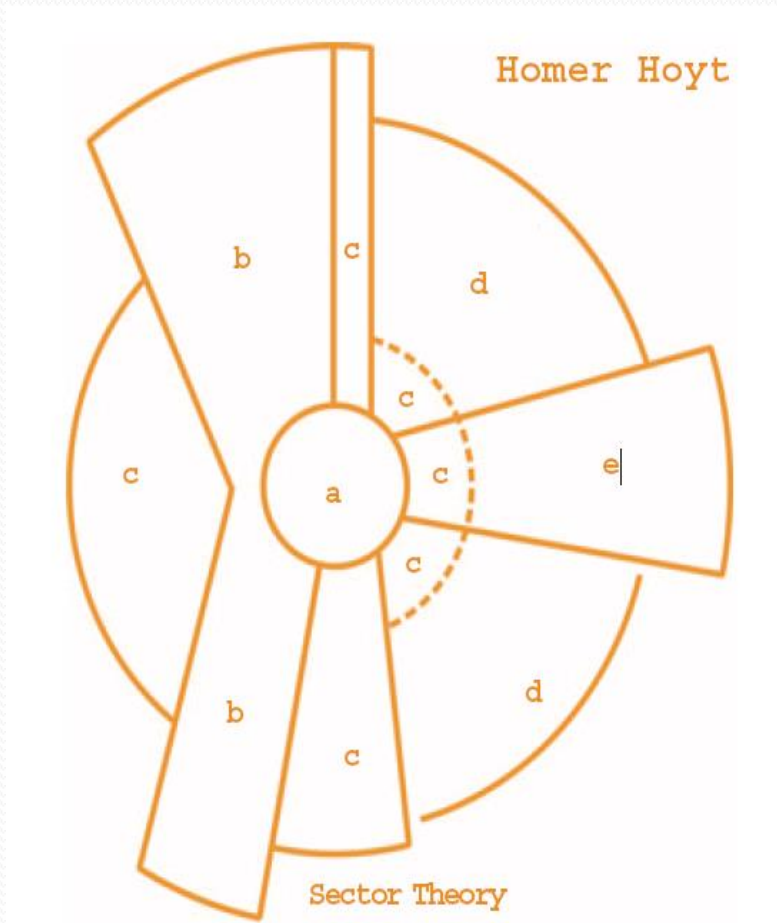
1. Sector Theory dari Hoyt

Menurut teori ini struktur ruang kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor dari pada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentrik.

PDK (Pusat Daerah Kegiatan) atau CBD (Central Business District) terletak di pusat kota, namun pada bagian lainnya berkembang menurut saktor-sektor yang bentuknya menyerupai irisan kue bolu.

Hal ini dapat terjadi akibat dari faktor geografi, seperti bentuk lahan dan pengembangan jalan sebagai sarana komunikasi dan transportasi.

Menurut Homer Hoyt, susunan kota sebagai berikut



- Central Business District (CBD) atau pusat kegiatan bisnis yang terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan pusat perbelanjaan.
- Sektor kawasan industri ringan dan perdagangan.
- Sektor kaum buruh atau kaum murba, yaitu kawasan permukiman kaum buruh.
- Sektor permukiman kaum menengah atau sektor madyawisma.
- Sektor permukiman adiwisma, yaitu kawasan tempat tinggal golongan atas yang terdiri dari para eksekutif dan pejabat.

2. Teori Tempat Sentral (Central Place Theory)

Walter Cristaller (Jerman tahun 1933) mengemukakan tentang teori tempat sentral.

Menurut Christaller terdapat konsep yang disebut jangkauan (range) dan ambang (treshold).

RANGE adalah jarak yang perlu ditempuh manusia untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja.

TRESHOLD adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang.

Dalam teori ini diasumsikan pada wilayah datar yang luas dihuni oleh sejumlah penduduk dengan kondisi yang merata.

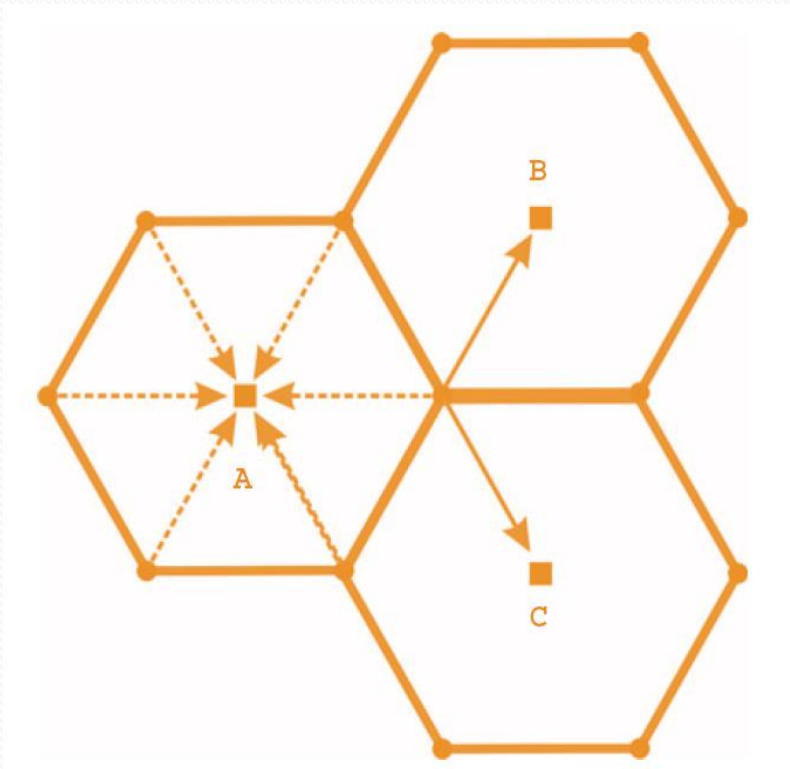
Dalam memenuhi kebutuhannya, penduduk memerlukan berbagai jenis barang dan jasa, seperti makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Untuk memperoleh kebutuhan tersebut penduduk harus menempuh jarak tertentu dari rumahnya yang disebut range.

Sementara itu para pedagang berupaya memperoleh keuntungan besar, sehingga mereka harus paham benar berapa banyak jumlah minimal penduduk (calon konsumen) yang diperlukan bagi kelancaran dan kesinambungan suplai barang atau jasa agar tidak mengalami kerugian.

Dengan kata lain mereka harus memilih lokasi yang strategis, yaitu sebuah pusat pelayanan berbagai kebutuhan penduduk dalam jumlah partisipasi yang maksimum.

Barang kebutuhan yang memiliki risiko kerugian besar karena jenis barang atau jasa yang dijual berupa barang-barang mewah disebut **THRESHOLD TINGGI**, misalnya, kendaraan bermotor, perhiasan, dan barang-barang lainnya dengan harga relatif mahal dan sulit terjual. dan sebaliknya barang-barang yang memiliki resiko rendah disebut **THRESHOLD RENDAH**.

Dari bentuk kebutuhan dan pelayanan di atas maka muncul istilah tempat sentral (Central Place Theory), yaitu lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada suatu tempat yang terpusat (sentral).



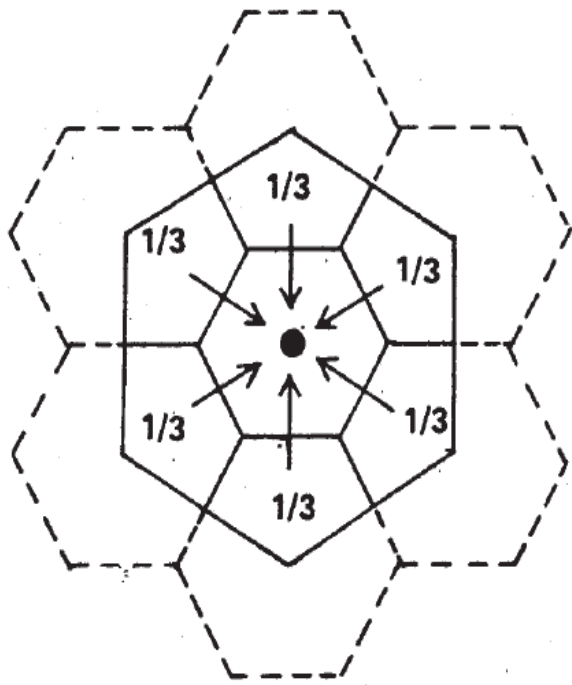
Skema hirarki $K = 3$ yang merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan bagi daerah sekitarnya, sering disebut kasus pasar optimal.

Tempat sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam. Daerah segi enam ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut.

Dalam kenyataannya dapat berupa kota-kota besar, pusat perbelanjaan atau mal, supermarket, pasar, rumah sakit, sekolah, kampus perguruan tinggi, ibukota provinsi, atau kota kabupaten yang masing-masing memiliki pengaruh atau kekuatan menarik penduduk yang tinggal di sekitarnya dengan daya jangkauan yang berbeda.

Tempat sentral dan daerah yang dipengaruhinya (komplementer), pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu hirarki 3 ($K = 3$), hirarki 4 ($K = 4$), dan hirarki 7 ($K = 7$).

Hirarki K = 3

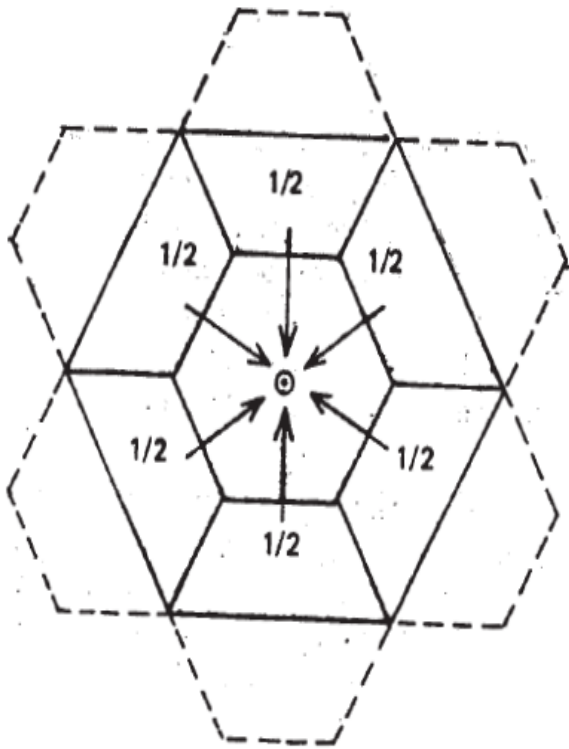


$$K = 6(1/3) + 1$$

$$K = 3$$

merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan bagi daerah sekitarnya, sering disebut kasus pasar optimal. Wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya

Hirarki K = 4

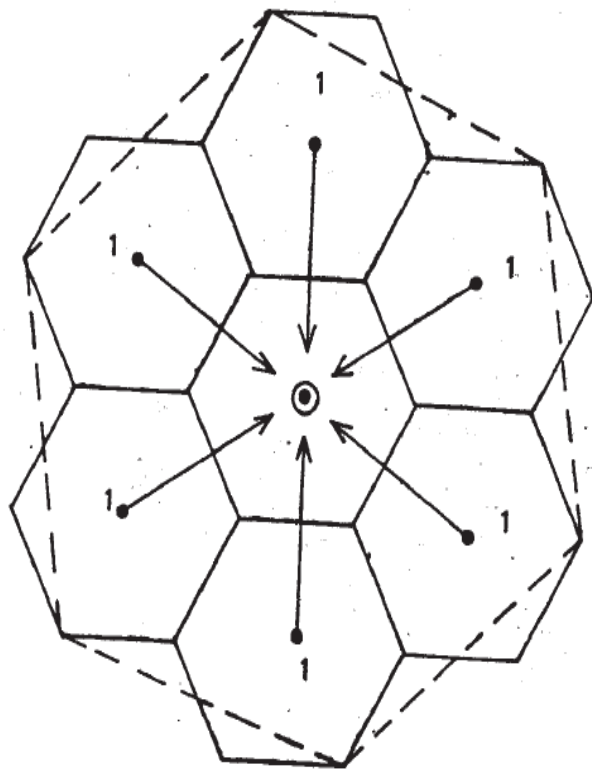


$$K = 6(1/2) + 1$$

$$K = 4$$

yaitu wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Situasi lalulintas yang optimum ini memiliki pengaruh setengah bagian di masingmasing wilayah tetangganya

Hirarki K = 7



$$K = 6(1) + 1$$

$$K = 7$$

yaitu wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian (satu bagian) masing-masing wilayah tetangganya.

Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan.

Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Poles Theory)

Perroux pada tahun 1955 mengemukakan tentang Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Poles Theory).

Dalam teori ini dinyatakan bahwa pembangunan kota atau wilayah di mana pun bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda.

Tempat-tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan tersebut dinamakan pusat-pusat atau kutub-kutub pertumbuhan.

Dari kutub-kutub tersebut selanjutnya proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya atau ke pusat-pusat yang lebih rendah.

Usaha Pengembangan Wilayah di Indonesia

Pengembangan wilayah di Indonesia harus didasarkan pendekatan-pendekatan khusus.

1. Pengembangan wilayah berdasarkan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) tertentu. Di dalam DAS tersebut di lakukan pemanfaatan sungai, tanah, dan sumber daya alam lainnya secara terintegrasi. Dengan demikian, dapat dikembangkan pertanian, peternakan, kehutanan, industri dan perikanan. Selain itu, termasuk perencanaannya dalam penanggulangan banjir dan erosi tanah.

2. Pengembangan wilayah pedesaan yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk pedesaan. Wujudnya dapat berupa pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
3. Pengembangan wilayah menurut sistem perkotaan.
4. Pengembangan wilayah berdasarkan kutub-kutub pertumbuhan (Growth Pole).
5. Pengembangan wilayah berdasarkan konsep agropolitan, yaitu menyebarkan berbagai industri kecil di wilayah pedesaan dan pengembangan lahan rekreasi sehingga tumbuh beberapa kota yang berada di daerah pertanian (agropolis).

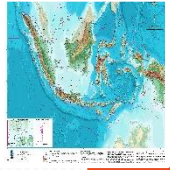
Untuk mengidentifikasi wilayah pertumbuhan didasarkan:

1. pertumbuhan ekonomi dengan cara melihat angka pertumbuhan ekonomi dari satu waktu ke waktu berikutnya;
2. laju pertumbuhan penduduk dengan cara melihat angka pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu;
3. perkembangan pemukiman dengan cara melihat perkembangan perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu;
4. tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat dengan cara melihat perkembangan tingkat pendidikan dari waktu ke waktu;
5. penggunaan teknologi dengan cara melihat perkembangan kemampuan teknologi yang digunakan;
6. budaya masyarakat dengan cara melihat budaya yang berkembang dalam masyarakat.

PERENCANAAN TATA RUANG

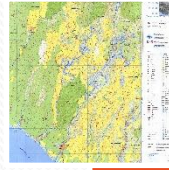


Rencana Tata Ruang di Indonesia



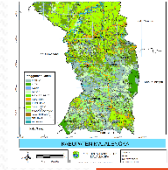
Rencana Tata Ruang Nasional
(RTRWN)

- Tujuan
- Fungsi
- Jangka waktu



Rencana Tata Ruang Provinsi

- Kedudukan
- Fungsi
- Manfaat



Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota

- Kedudukan
- Fungsi
- Manfaat

Permasalahan dalam Penerapan Tata Ruang di Indonesia



Pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif



Lembaga penyelenggara penataan ruang belum efektif



Sistem informasi penunjang pembangunan belum optimum



Kesenjangan antarwilayah di Indonesia



Potensi konflik pemanfaatan ruang